

# **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

# DASAR HUKUM

- ✓ TAP MPRS NO. XI/MPR/1998 TTG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
- ✓ UU NO.28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
- ✓ UU NO. 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI
- ✓ INPRES NO. 5 TAHUN 2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- ✓ PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 TTG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
- ✓ PERATURAN KPK NOMOR 2 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TTG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
- ✓ SE MENPAN NOMOR SE/03/M.PAN/01/2005 TTG LHKPN
- ✓ SE MENPAN RB NOMOR 01 TAHUN 2015 TTG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKASN

# LHKPN KOTA BIMA

- ✓ PERATURAN WALIKOTA BIMA NO. 30 THN 2017 TTG LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
- ✓ PERATURAN WALIKOTA BIMA NO. 24 THN 2018 TTG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NO. 30 THN 2017 TTG LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
- ✓ KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NO. 188.45/89/800/I/2020 TTG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LHKPN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

# TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN

1. Menyusun Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima yang Wajib LHKPN
2. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan Pengelolaan data Wajib LHKPN dan Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WajibLHKPN maupun PL
3. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya untuk memenuhi kewajiban Penyampaian dan pengumuman LHKPN
4. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Bima
5. Melakukan Verifikasi pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib LHKPN dan Membuat akun admin unit kerja
6. Memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN
7. Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN
8. Melakukan pengaktifan akun Wajib LHKPN, sehingga dapat menggunakan modul e-filing
9. Melakukan Peremajaan data kepegawaian Wajib LHKPN secara berkala karena terjadi penempatan PNS ( Mutasi, Rotasi, Promosi) pada Aplikasi Wajib LHKPN

# WAJIB LHKPN KOTA BIMA

- ✓ WALIKOTA BIMA
- ✓ WAKIL WALIKOTA BIMA
- ✓ PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
- ✓ PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
- ✓ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- ✓ AUDITOR DAN PENGAWA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH
- ✓ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
- ✓ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
- ✓ PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
- ✓ BENDAHARA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- ✓ PENYELENGGARA NEGARA TERTENTU ATAS PERMINTAAN KPK

# LAPORAN PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2019

PER 31 AGUSTUS 2020

PEJABAT	JML	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KET.
PIMPINAN	2	1	1	
ESELON II	32	32	0	
ESELON III	126	122	4	
FUNGSIONAL AUDITOR, PPUPD	29	27	2	
BENDAHARA	40	34	6	
JUMLAH TOTAL	229	216	13	